

Membaca Arah Kebijakan Pendidikan Saat Ini: Dari Pemerataan Akses Menuju Penguatan SDM Indonesia Unggul

Oleh: Katiman (Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas)

Perubahan merupakan keniscayaan dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial, perubahan karakter dunia kerja, hingga tantangan pembangunan berkelanjutan menuntut sistem pendidikan terus beradaptasi. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan pendidikan tidak lagi cukup diukur dari banyaknya sekolah yang dibangun atau jumlah peserta didik yang bersekolah, tetapi juga dari sejauh mana pendidikan mampu menghasilkan manusia yang sehat, berkarakter, adaptif-resilien, kreatif, dan mampu belajar sepanjang hayat.

Perubahan tantangan tersebut tentu mengubah cara Pemerintah memandang pembangunan pendidikan. Pendidikan tidak lagi diposisikan sebagai kumpulan program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sebagai sebuah ekosistem yang menghubungkan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, pengembangan talenta, kesehatan peserta didik, tata kelola, pembiayaan, teknologi, hingga kemitraan multipihak dalam satu kerangka pembangunan yang utuh.

Perspektif tersebut sejalan dengan laporan UNESCO *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education* (2021). UNESCO menegaskan bahwa tantangan masa depan tidak dapat dijawab dengan pendekatan pendidikan yang bersifat sektoral. Pendidikan memerlukan kontrak sosial baru yang menempatkan kolaborasi, kepercayaan, pemerataan kesempatan belajar, dan penguatan kapasitas guru sebagai fondasi transformasi pendidikan.

Pada saat yang sama, OECD *Learning Compass 2030*, sebuah kerangka pembelajaran masa depan yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui proyek *Future of Education and Skills 2030*, menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang mengembangkan kompetensi, karakter, serta *learner agency* agar peserta didik mampu menghadapi perubahan yang semakin kompleks.

Dalam konteks tersebut, program-program direktif Presiden yang saat ini disebut Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), terutama dalam Bidang Pendidikan, yang mencakup paling tidak 11 Program Pendidikan, dapat dipahami sebagai upaya pemerintah membangun sistem pendidikan yang lebih terintegrasi. Program-program tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 pilar, yaitu: memperluas akses dan memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pembelajaran dan guru, mengembangkan talenta dan daya saing, serta mendukung kesehatan, gizi, dan perlindungan yang di dalamnya termasuk program MBG. Empat pilar tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pemerataan Akses sebagai Fondasi Transformasi

Transformasi pendidikan selalu dimulai dari pemerataan kesempatan belajar. Meskipun angka partisipasi pendidikan Indonesia terus meningkat, tantangan pemerataan layanan pendidikan antarwilayah masih menjadi perhatian. Perbedaan kualitas sarana dan prasarana,

kondisi geografis, hingga kesenjangan sosial ekonomi menyebabkan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu belum sepenuhnya merata.

Karena itu, sebagai pilar pertama, pemerintah menempatkan perluasan akses dan penguatan infrastruktur pendidikan sebagai fondasi utama transformasi. Program revitalisasi sekolah dan madrasah yang ditargetkan menysasar lebih dari 200 ribu sekolah di tahun 2028, bantuan perlengkapan sekolah yang menysasar 9,5 juta murid di 2026, Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang ditetapkan berdasarkan Inpres 10/2026 dan di tahun 2026 dimulai dengan operasionalisasi 17 sekolah, maupun Sekolah Rakyat yang menysasar keluarga miskin dan miskin ekstrem desil 1 dan 2, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak lagi sekadar membangun gedung sekolah, melainkan membangun keadilan pendidikan sehingga setiap anak memperoleh kesempatan berkembang sesuai potensinya.

Penguatan Guru sebagai Investasi Strategis

Pemerataan akses saja belum cukup. Sekolah yang mudah dijangkau belum tentu mampu menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Berbagai penelitian pendidikan menunjukkan bahwa guru merupakan faktor paling menentukan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Oleh sebab itu, sebagai pilar kedua, arah kebijakan pendidikan nasional menempatkan guru sebagai pusat transformasi pembelajaran. Penguatan kompetensi profesional, peningkatan kesejahteraan, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan budaya belajar kolaboratif menjadi bagian dari strategi membangun profesi guru yang semakin adaptif terhadap perubahan.

Paradigma tersebut sekaligus menggeser orientasi pengembangan guru dari pelatihan yang bersifat insidental menuju pembelajaran profesional berkelanjutan, di mana sekolah menjadi komunitas belajar yang terus melakukan refleksi, inovasi, dan perbaikan mutu pembelajaran.

Dalam paradigma baru ini, sekolah diposisikan bukan hanya sebagai tempat mengajar, tetapi sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*). Guru didorong untuk terus belajar, berkolaborasi, melakukan refleksi, serta berbagi praktik baik sebagai bagian dari budaya profesional yang terus berkembang.

Untuk meningkatkan kompetensi guru, Pemerintah menggagas salah satunya program Studio Guru yang bertujuan untuk membangun studio di tingkat pusat dan menghasilkan berbagai bahan pembelajaran untuk seluruh jenjang dan mapel. Diharapkan pada tahun 2027 program ini telah beroperasi penuh. Selain itu, untuk melanjutkan program peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian TPG, ditargetkan di tahun 2027 sertifikasi guru telah mencapai 100 persen dan guru-guru di bawah binaan Kementerian Agama juga mendapatkan tambahan insentif.

Menyiapkan Talenta Indonesia yang Berdaya Saing

Memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan, pendidikan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni menyiapkan generasi yang mampu berkompetisi di tingkat global tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Pemerintah telah menyiapkan berbagai inovasi kebijakan.

Pada pilar ketiga ini, Pemerintah menyiapkan talenta-talenta yang berkualitas dan berdaya saing global melalui berbagai program seperti Sekolah Unggul Garuda (SUG) yang telah beroperasi di tahun 2025 (SUG Baru dan 42 SUG Transformasi), serta ditargetkan bertambah 9 SUG Baru dan 50 SUG Transformasi di tahun 2027. Pengembangan perguruan tinggi berbasis STEMM yang dimulai tahun 2027, serta SMK Go Global, merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem pengembangan talenta nasional. Fokusnya bukan semata-mata meningkatkan capaian akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, kepemimpinan, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

Pendidikan Berkualitas Dimulai dari Anak yang Sehat

Pada pilar keempat, Pemerintah juga menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kualitas kesehatan peserta didik. Anak yang sehat memiliki kesiapan belajar yang lebih baik, kemampuan berkonsentrasi yang lebih tinggi, serta peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar optimal.

Karena itu, penguatan layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan. Integrasi antara sektor pendidikan dan sektor kesehatan menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia dipandang secara holistik, bukan hanya melalui aspek akademik semata.

Dengan demikian, pendidikan diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia (*human capital*) yang akan menentukan daya saing Indonesia di tingkat global. Arah kebijakan ini sejalan dengan OECD yang menempatkan kompetensi masa depan sebagai perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Kolaborasi Menjadi Kata Kunci dan Keberlanjutan

Transformasi pendidikan tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kompleksitas tantangan pendidikan dan cepatnya perkembangan dinamika global menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, masyarakat, orang tua, hingga media massa.

Kemitraan multipihak memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, berbagi sumber daya, pengembangan inovasi, serta percepatan penyebaran praktik-praktik baik di berbagai daerah. Dalam konteks inilah pendidikan menjadi gerakan bersama, bukan semata-mata program pemerintah.

Sebagaimana ditegaskan UNESCO bahwa masa depan pendidikan hanya dapat dibangun melalui *social contract* baru yang berlandaskan kolaborasi, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan kesempatan belajar bagi setiap warga negara.

Kembali ke program-program PKPN Bidang Pendidikan, Pemerintah merancang orientasi programnya lebih sistemik. Program-program tersebut tidak hanya ditetapkan untuk menghasilkan capaian sesaat, tetapi membangun fondasi pendidikan yang mampu terus berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan.

Penutup

Jika dicermati secara utuh, arah kebijakan pendidikan nasional saat ini menunjukkan upaya Pemerintah membangun transformasi yang lebih menyeluruh dengan berbasis ekosistem dan kolaborasi. Pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan talenta, penguatan kesehatan peserta didik, perbaikan tata kelola, serta kolaborasi multipihak merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling mendukung untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Tantangan pendidikan di masa depan tentu akan semakin kompleks. Namun, dengan membangun pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat, Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mewujudkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, kreatif, sehat, serta mampu menjadi warga dunia yang tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Itulah esensi dari arah kebijakan pendidikan saat ini: bukan sekadar memperbaiki sekolah, melainkan membangun masa depan Indonesia melalui transformasi pendidikan yang menyeluruh.

Pada akhirnya, arah kebijakan pendidikan saat ini memberikan pesan yang jelas: membangun pendidikan bukan sekadar membangun sekolah atau menyusun kurikulum baru, melainkan membangun sebuah ekosistem pembelajaran yang memungkinkan setiap anak Indonesia tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Jika ekosistem tersebut mampu dijalankan secara konsisten dan kolaboratif, maka cita-cita menghadirkan SDM Indonesia Unggul menuju Indonesia Emas 2045 akan semakin dekat untuk diwujudkan.